

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta penjabarannya dari Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2019 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga terwujud *good governance*.

Sempor, 30 Januari 2021

CAMAT SEMPOR
KABUPATEN KEBBUMEN

Drs. BUDIONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691016 199001 1 001

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum Organisasi
- 1.2. Fungsi Strategis
- 1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
 1. Rencana Strategis (Renstra)
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Capaian kinerja Tahun 2020
 2. Capaian kinerja selama 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis
 3. Capaian realisasi sampai dengan Tahun 2020 dibandingkan target Rencana Strategis Tahun 2016-2021.
 4. Analisis penyebab penurunan kinerja
 5. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
- 3.2. Realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
- 4.2. Permasalahan/Kendala
- 4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

** Dasar Hukum Penyusunan LKjIP*

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
- d. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan

** Tugas Pokok dan Fungsi*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dengan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

* *Kepegawaian*

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen sebanyak 17 orang terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Pembina Tingkat I (IV/b) | : 1 orang |
| 2. Pembina (IV/a) | : 1 orang |
| 3. Penata Tk. I (III/d) | : 4 orang |
| 4. Penata (III/c) | : 1 orang |
| 5. Penata Muda Tk.I (III/b) | : 4 orang |
| 6. Penata Muda (III/a) | : 2 orang |
| 7. Pengatur Tk. I (II/d) | : 1 orang |
| 8. Pengatur (II/c) | : 2 orang |
| 9. Pengatur Muda Tk.I (II/b) | : 1 orang |
| 10. Pengatur Muda (II/a) | : - orang |

Jumlah personil Kantor Kecamatan menurut eselonering adalah :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Camat, Eselon IIIa | : 1 orang |
| 2. Sekcam, Eselon IIIb | : 1 orang |
| 3. Kepala Seksi, Eselon IVa | : 4 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian, Eselon IVb | : 2 orang |

Jumlah personil Kantor Kecamatan menurut tingkat pendidikan adalah :

- | | |
|------------|-----------|
| 1. SLTP | : - orang |
| 2. SLTA | : 9 orang |
| 3. D1 – D3 | : 1 orang |
| 4. S1 | : 6 orang |
| 5. S2 | : 1 orang |

*. *Kekuatan Sumber Daya yang Ada*

1. Geografis / Administrasi

Kecamatan Sempor merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Kebumen dan terletak di bagian utara Kabupaten Kebumen. Dengan luas wilayah 10.014 Ha, mempunyai posisi strategis pada jalur lintas ekonomi selatan antara Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara sekaligus sebagai bagian jalur alternatif yang menghubungkan pantai utara (Pantura) dengan pantai selatan pulau Jawa.

Kecamatan Sempor memiliki batas – batas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--|
| - Sebelah Utara | : Kabupaten Banjarnegara |
| - Sebelah Timur | :Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Karanggayam |
| - Sebelah Barat | : Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Buayan |
| - Sebelah Selatan | : Kecamatan Gombang dan Kecaamatan Kuwarasan |

Secara Administrasi Kecamatan Sempor terbagi dalam 16 Desa, 70 Dusun, 78 RW, 375 RT, dengan klasifikasi dan status Desa semuanya swakarya.

2. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Sempor adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan

pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Sempor hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam.

3. Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kecamatan Sempor cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah. Sebagai salah satu jalur alternatif penghubung pantai utara dengan pantai selatan pulau Jawa yang ada pada saat ini menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya di bagian utara Kecamatan Sempor. Hal ini juga didukung tersedianya prasarana jalan dan jembatan pada kondisi cukup baik dan didukung dengan alat transportasi, baik kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Di bidang kesehatan terdapat sarana Puskesmas 2 unit didukung 8 Poliklinik dan 75 Posyandu. Selain sarana dan prasarana tersebut diatas juga didukung dengan sarana pendidikan dan telekomunikasi berupa pesawat telepon, jaringan internet, stasiun radio swasta dan media komunikasi yang lainnya.

4. Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Sempor sangat potensial untuk pembangunan pertanian dengan luas wilayah 10.014 Ha yang terdiri dari 1.244 Ha sawah, 4.838 Ha tanah kering dan 3.933 Ha hutan negara. Topografi Kecamatan Sempor didominasi pegunungan dimana dari 16 desa yang ada 9 desa merupakan desa pegunungan. Di sektor kepariwisataan Kecamatan Sempor mempunyai potensi yang menarik dengan adanya bendungan/waduk Sempor. Obyek wisata waduk Sempor merupakan andalan dan sumber PAD yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomi daerah.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor – faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal. Kecamatan Sempor memiliki warga dengan tingkat pendidikan SLTA keatas sebesar 19 % sehingga diharapkan dapat menjadi *agent of change* yang dapat memotifasi lingkungannya untuk kemajuan bersama.

1.2 Fungsi Strategis Kecamatan Sempor

Kecamatan pada pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2008 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dipimpin oleh seorang Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kemudian adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang melayani masyarakat dalam kebutuhan dokumen administrasi kependudukan, perizinan dan legalisasi.

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi

Dalam rangka menciptakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang prima diperlukan dukungan dalam beberapa aspek yaitu:

1. Aspek tata laksana

Pelaksanaan pelayanan masih dilaksanakan secara konvensional terutama pada bagian *front office* dimana pengaturan antrian belum menggunakan sistem otomatisasi untuk menjamin rasa keadilan masyarakat.

2. Aspek sumber daya manusia :

- a. Keterbatasan jumlah PNS pada lini staf menyebabkan adanya rangkap tugas yaitu sebagai petugas pelayanan sekaligus merangkap staf pada seksi.
- b. Dibutuhkan petugas yang cakap yaitu paham Teknologi Informatika sekaligus punya *soft skills* yang cukup memadai untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Aspek sarana dan prasarana :

- a. Luas ruang pelayanan belum memadai daya tampungnya sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada saat ramai terpaksa menunggu diluar ruang tunggu.
- b. Ruang dan alat bermain anak belum ada sehingga pelayanan PATEN belum ramah anak.
- c. Belum tersedianya mesin antrian otomatis.

4. Aspek kebencanaan

Bencana non alam berupa pandemi COVID19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran dan pelarangan adanya kerumunan orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen mendasarkan diri pada visi daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi daerah dijabarkan dalam misi. Kecamatan Sempor mengemban sebagian dari Misi ke-6 yaitu Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

C. TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel dan partisipatif..

2. Indikator Kinerja Utama

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
2. Terasilitasnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

3. Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan
4. Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan,dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	97 %
		Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	A
2	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	100 %
3	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	100 %
4	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Persentase organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100 %
		Persentase petugas keamanan dan kenyamanan lingkungan desa yang terlatih	100 %
		Persentase penyelenggaraan HUT RI dan detik-detik proklamasi	100 %
		Persentase desa dengan masyarakat memiliki tekad dalam pembangunan desa	100 %
		Persentase organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	100 %

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu ditetapkan perjanjian kinerja tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	97 %	22 %	28 %	21 %	26 %
		Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	A				A
2	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	100 %	59 %	7 %	28 %	6 %
3	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	100 %			100 %	
4	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Persentase organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	0 %				
		Persentase petugas keamanan dan kenyamanan lingkungan desa yang terlatih	0 %				
		Persentase penyelenggaraan HUT RI dan detik-detik proklamasi	100 %			100 %	
		Persentase desa dengan masyarakat memiliki tekad dalam pembangunan desa	100 %	50 %	31 %	19 %	
		Persentase organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	100 %	69 %	18 %	7 %	6 %

	Program	Anggaran	Ket.
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 218.017.000	APBD
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 35.931.000	APBD
3	Pengembangan data/informasi	Rp. 5.000.000	APBD
4	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp. 7.779.000	APBD
5	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Perdesaan	Rp. 12.000	APBD
6	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rp. 5.720.000	APBD
7	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social	Rp. 2.571.000	APBD
8	Peningkatan peran serta kepemudaan	Rp. 22.000	APBD
9	Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 16.256.000	APBD
10	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp. 19.532.000	APBD
11	Peningkatan peran perempuan di perdesaan	Rp. 25.494.000	APBD
12	Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 67.673.000	APBD
13	Perencanaan pembangunan daerah	Rp. 26.062.000	APBD
Jumlah		Rp. 430.069.000	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2020 adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	97 %	97 %
		Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	A	A
2	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	100 %	100 %
3	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	100 %	100 %
4	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Persentase organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	0 %	0 %
		Persentase petugas keamanan dan kenyamanan lingkungan desa yang terlatih	0 %	0 %
		Persentase penyelenggaraan HUT RI dan detik-detik proklamasi	100 %	100 %
		Persentase desa dengan masyarakat memiliki tekad dalam pembangunan desa	100%	100 %
		Persentase organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	100 %	100 %

2. Capain kinerja selama 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis seperti terlihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Capaian Sasaran pada Tahun 2016-2020

[illegible]

3. Capaian realisasi sampai dengan Tahun 2020 dibandingkan target Rencana Strategis Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi s/d 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	97 %	97 %
		Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	B	A
2	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	100 %	100 %
3	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	100 %	100 %
		Persentase kelompok (desa) yang menerima hibah barang/jasa	100 %	100 %
4	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Persentase organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100 %	80 %
		Persentase petugas keamanan dan kenyamanan lingkungan desa yang terlatih	100 %	80 %
		Persentase penyelenggaraan HUT RI dan detik-detik proklamasi	100 %	100 %
		Persentase desa dengan masyarakat memiliki tekad dalam pembangunan desa	100 %	100 %
		Persentase organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	100 %	100 %

4. Analisis penyebab penurunan kinerja

Penurunan kinerja secara keseluruhan disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan bencana non alam berupa pandemi Covid19. Sekalipun demikian terhadap realisasi capaian kinerja Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Sempor mengalami kenaikan. Hal ini mencerminkan keadaan dimana sekalipun terjadi refocusing anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan OPD Kecamatan Sempor terhadap masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya
- a. Sumber daya manusia
Pada tahun 2020 dengan 17 orang PNS dan 2 orang THL Kecamatan Sempor dapat melaksanakan tugas-tugas rutin dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kekurangan tentu saja ada, faktor rangkap tugas adalah salah penyebabnya mengingat keterbatasan jumlah personil.
 - b. Sumber daya anggaran
Anggaran kegiatan tahun 2020 sebesar Rp. 430.069.000,- terealisasi Rp. 386.193.750,- atau 89,79 %. Sehingga terjadi penghematan sebesar Rp. 43.875.250,- atau 10,20 %.
 - c. Sumber daya aset
Dengan aset tetap senilai Rp. 659.713.071,- pada tahun 2020 dirasa cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersaji pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Table 3.2 Program/kegiatan Tahun 2020

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 1.601.000,00 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 30.645.000,00 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 35.000.000,00 Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 16.015.000,00 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Tercukupinya kebutuhan jasa administrasi keuangan
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 30.550.000,00 Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 5.230.000,00 Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 5.896.000,00 Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 3.700.000,00 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 2.500.000,00 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 2.000.000,00 Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11	Penyediaan makanan dan minuman	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 38.880.000,00 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Tercukupi kebutuhan makanan dan minuman rapat
12	Rapat - rapat koordinasi dan kon sultasi ke luar daerah	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 1.000.000,00 Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
13	Rapat - rapat koordinasi dan kon sultasi dalam daerah	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 45.000.000,00 Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
14	Pengadaan mebeleur	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 14.000.000,00 Jumlah unit pengadaan mebeleur kantor Bertambahnya mebeleur kantor yang memadai
15	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 13.000.000,00 Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor Bertambahnya sarana prasarana kantor yang memadai
16	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 10.000,00 Jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas
17	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 10.000,00 Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 8.911.000,00 Jumlah kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
	Program pengembangan data/informasi		
19	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 5.000.00,00 Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renstra, Renja dan RKA/DPA) Tersusunnya dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan RKA/DPA)
	Program pengembangan data/informasi		
20	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 7.779.000,00 Jumlah dokumen database yang disusun Tersusunnya dokumen database/profil desa
	Program perencanaan pembangunan daerah		
21	Penyelenggaraan musrenbangcam	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 20.531.000,00 Jumlah pelaksanaan musrenbangcam Tersusunnya dokumen perencanaan partisipatif
22	Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 5.531.000,00 Jumlah kegiatan IPMD Tersedianya dokumen IPMD
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
23	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 67.673.000,00 Jumlah bulan penyelenggaraan PATEN Terlayaninya pemohon KTP, perizinan dan legalisasi
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		
24	Fasilitasi APBDes	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 19.532.000,00 Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan APBDes Tersusunnya dokumen APBDes yang transparan sesuai RKPDes
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan		
25	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 5.720.000,00 Jumlah fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya program pembangunan di desa
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	
26	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 2.571.000,00 Jumlah fasilitasi TKP2KDes Terlaksananya fasilitasi TKP2KDes
Program peningkatan peran serta kepemudaan			
27	Pembinaan organisasi kepemudaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 11.000,00 Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan
28	Pembinaan sosial masyarakat	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 11.000,00 Jumlah kegiatan pembinaan social masyarakat Terlaksananya kegiatan pembinaan social masyarakat
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			
29	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 12.000,00 Jumlah linmas terlatih Tercukupinya linmas desa yang terlatih
Program pengembangan wawasan kebangsaan			
30	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 16.256.000,00 Jumlah kegiatan rangkaian peringatan HUT RI Terlaksananya kegiatan rangkaian peringatan HUT RI
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan			
31	Pembinaan PKK	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 25.494.000,00 Jumlah kegiatan pembinaan TP. PKK Terlaksananya kegiatan pembinaan TP. PKK

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun anggaran 2020 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Realisasi APBD Tahun 2020

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	PERS EN T ASE (%)	KET
1	2	3	4	5
<i>Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah</i>				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.601.000,00 30.645.000,00	1 596 000,00 19.330.624,00	99,69 63,08	

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	PROS ENT ASE (%)	KET
1	2	3	4	5
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	35.000.000,00	25.373.826,00	89,77	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	16.015.000,00	15.620.000,00	97,53	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.550.000,00	30.548.400,00		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	5.230.000,00	5.230.000,00	99,99	
Penyediaan alat tulis kantor	5.896.000,00	5.896.000,00	100	
Penyediaan barang cetakan & penggandaan	3.700.000,00	3.699.900,00	99,99	
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	2.498.200,00	99,93	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	2.000.000,00	1.320.000,00	66,00	
Penyediaan makanan dan minuman	38.880.000,00	38.880.000,00	100	
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.000.000,00	980.000,00	98,00	
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	100	
Program Peningkatan Sarana dan Prasa rana Aparatur				
Pengadaan mebeleur	14.000.000,00	12.734.000,00	90,96	
Pengadaan sarana dan prasarana kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	100	
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	10.000,00	0,00	0	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000,00	0,00	0	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	8.911.000,00	8.911.000,00	100	
Program pengembangan data/informasi				
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	5.000.000,00	4.840.000,00	96,80	
Program Pengembangan data/informasi/ statistik daerah				
Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	7.779.000,00	7.679.000,00	98,71	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
Penyelenggaraan Musrenbangcam	20.531.000,00	14.380.800,00	70,40	
Rakor dan inventarisasi proyek masuk desa	5.531.000,00	5.531.000,00	100	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				
Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	67.673.000,00	67.440.000,00	99,66	

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	PROS ENT ASE (%)	KET
1	2	3	4	5
<i>Sasaran :Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</i>				
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Fasilitasi APBDes	19.532.000,00	19.487.000,00	99,77	
<i>Sasaran : Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan</i>				
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi TKP2KDes/Kel	2.571.000,00	2.560.000,00	99,57	
<i>Sasaran : Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, kemandirian lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik</i>				
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan	11.000,00	0,00	0	
Pembinaan sosial masyarakat	11.000,00	0,00	0	
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	12.000,00	0,00	0	
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Kegiatan Fasilitasi program pembangunan perdesaan	5.720.000,00	5.580.000,00	97,55	
Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	16.256.000,00	4.519.500,00	27,80	
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pembinaan PKK	25.494.000,00	23.558.500,00	92,41	
Jumlah	430.069.000	386.193.750	89,79	

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2020 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020 dari 4 (empat) sasaran strategis yang dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) indikator kinerja dapat tercapai semua (tersaji pada Tabel 3.1). Adapun pencapaian tersebut didukung oleh 31 (tiga puluh satu) kegiatan dalam 13 (tiga belas) program. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 386.193.750,00 dari Rp. 430.069.000,00 atau sebesar 89,79 %.

4.2 Permasalahan/ Kendala

Adanya bencana non alam berupa pandemic COVID19 berskala global sejak awal tahun 2020 membuat proses pencapaian kinerja tidak dapat maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- 1) Dilakukan refocusing anggaran untuk dialihkan kepada usaha penanggulangan wabah COVID19;
- 2) Pembatasan aktifitas berupa jaga jarak sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang ditiadakan sehingga kegiatan berupa rapat dan bimtek tatap muka tidak terlaksana.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dampak dari pandemi global COVID19 diprediksi akan berlangsung lama. Namun demikian semangat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetap menjiwai seluruh kegiatan. Hal tersebut tercermin dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dengan predikat Sangat Baik pada skor 88,57.

Pencapaian tersebut diatas akan dipertahankan dan bahkan akan ditingkatkan dengan upaya-upaya diantaranya:

- 1) Memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai kinerja yang tinggi;
- 2) Merencanakan penganggaran pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan melalui aktifitas rehabilitasi ruang pelayanan supaya lebih memadai;
- 3) Dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang pelayanan berorientasi pada pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada penyandang difabel dan anak-anak (ramah anak);
- 4) Akan menerapkan rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL) secara terbuka dan melalui seleksi yang ketat untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dalam rangka menunjang program dan kegiatan pada kantor Kecamatan Sempor.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ini disusun untuk menyajikan
pencapaian kinerja organisasi sampai dengan tahun 2020 dengan harapan dapat
bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

CAMAT SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

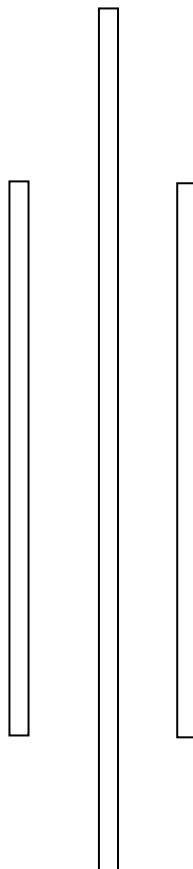
Drs. BUDIONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691016 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jl. Kaligandu No.107 Jatinegara, Sempor - Kebumen
Telp. (0287) 471055

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020



SEMPOR, 30 JANUARI 2021

LAMPIRAN